

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika konflik kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan konsep *policy conflict framework* menurut Weible & Heikkila (2017) yang terdiri dari 3 fokus penelitian yakni *policy setting*, *conflict episodes*, dan *outcomes and feedback* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada aspek *policy setting*, menunjukkan bahwa kerangka kebijakan penataan PKL secara normatif telah tersusun melalui regulasi, dokumen perencanaan, serta pembagian kewenangan aktor yang relatif jelas. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada ketertiban ruang dan PKL yang berorientasi pada keberlangsungan ekonomi, serta ketimpangan akses dalam pengambilan keputusan, menyebabkan kebijakan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi lapangan. Akibatnya, konflik kebijakan cenderung terjadi secara berulang.
2. Pada aspek *conflict episodes*, konflik kebijakan yang terjadi di Kawasan Gading Fajar berkembang secara bertahap mulai dari konflik laten, eskalasi, hingga konfrontasi terbuka. Konflik dipicu oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan PKL, yang semakin meningkat ketika kebijakan penertiban tidak

diikuti dengan solusi relokasi yang jelas dan layak. Selain itu, terbentuknya dua koalisi utama, yaitu koalisi pro penertiban (pemerintah dan tokoh masyarakat) serta koalisi anti penertiban (PKL dan paguyuban), memperkuat dinamika konflik yang terjadi dan menghambat tercapainya solusi yang komprehensif.

3. Pada aspek *outcomes and feedback*, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL belum menghasilkan capaian yang berkelanjutan karena masih didominasi oleh penertiban dan pembinaan yang bersifat sementara. Hal ini memunculkan berbagai reaksi dari aktor, seperti Satpol PP yang menjalankan peran secara normatif, Dinas Koperasi yang mendorong evaluasi dan pemberdayaan, PKL yang cenderung resistif akibat ketidakpastian lokasi usaha, serta masyarakat yang terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh dan justru menyebabkan konflik terus berulang

Maka dapat disimpulkan bahwa konflik kebijakan dalam penataan PKL di Kawasan Gading Fajar masih berada pada kondisi yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan, serta belum terintegrasinya pendekatan penataan dan pemberdayaan, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis diajukan untuk memberikan upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gading Fajar:

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun kebijakan penataan PKL yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek penegakan ketertiban dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui penyediaan lokasi relokasi yang layak, strategis, serta didukung akses permodalan dan pemasaran bagi PKL
2. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor antar OPD yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab dalam penataan dan Pemberdayaan PKL dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana penegakkan peraturan daerah terkait rencana penataan PKL dengan melibatkan PKL, paguyuban, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan lebih responsif dan mampu meminimalisir konflik yang berkepanjangan.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo perlu mengoptimalkan program pemberdayaan PKL secara komprehensif melalui pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala dengan mempertimbangkan *feedback* dari seluruh aktor yang terlibat agar konflik dalam kebijakan penataan PKL ini lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik yang berulang.